

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/750 /B.III/HK/2014

TENTANG -

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor: S-346/MK.7/2014 Tanggal 22 Juli 2014 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR TENTANG HASIL **EVALUASI** Menetapkan : KEPUTUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut hal telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya **KEEMPAT** disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal /7 -9- 2014.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- Menteri Keuangan di Jakarta;
 Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GIATO /B.III/HK/2014 TANGGAL : 17 - 9- 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempumaan	Keterangan
1_	2	3	4	5
1	Kop Raperda	-	- -	Kop Raperda dan tertuk tata naskah agar berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2	Diktum Menimbang	 a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu diadakan pembinaan kemetrelegian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai; b. bahwa produsen dan kensumen perlu mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan perdagangan, dimana pelayanan kemetrelegian menjadi bagian dari kegiatan perdagangan tersebut guna mendukung tersiptanya perdagangan yang sehat; c. bahwa sengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah; 	produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu di lakukan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP);	Diktum Menimbang disempurnakan

1	7	3	4	5
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan-huruf e-maka pertu menetapkan Peraturan Daerah Kabupater Pesawaran tentang RetribusiPelayanan Tera/Tera Ulang;		
3	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 	Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	Angka 5 disempumakan
		11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang tanf Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);	Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, <u>Tambahan</u> <u>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)</u> , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran	Angka 11 disempurnakan
		16. Peraturan-Pemerintah-Nemer-15 Tahun-2012 tentang Jenis-dan-Tarif Atas Jenis-Penerimaan-Negara-Bukan Pajak yang Berlaku-Pada-Kementerian-Perdagangan (Lembaran-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-2012 Nemer-77, Tambahan-Lembaran-Negara-Republik Indonesia-Nemer-5300);		Angka 16, 17 dan Angka 19 dihilangkan karena tidak ada keterkaitan dengan Raperda
		 Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 		
		19. Keputusan Meneteri Dalam Negeri-Nemer 7-Tahun 2003 tentang Pedeman Oprasional Penyidik Pegewai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;		

1	2	3	4	5
			 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Peraturan Menten Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. 	- Tambahkan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Përaturan Menteri Perdaganagan dibidang Tera - Urutan disesuaikan dengan hirarki perUUan
4	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP	Pasal 2 Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan periengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 2 dan Pasal 3 disempumakan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
,		Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.	Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;dan (2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	Cara Mengukur	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang, jasa kalibrasi-atas alat-UTTP dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 7	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pelayanan retribusi. Pasal 7	Pasal 4 disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frokwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.	Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan	

1	2		3					4				5
6	Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi	P Struktur dan besarnya tera/tera ulang adalah seb		retribusi	pelayanan		Pa ktur dan besarnya /tera ulang adalah seba			pelayanan	1.	Pasal 8 disempumakan, dengan menghapus
	Resibusi	No Jenis UTTP dan BDKT	Satua	Tera Pengujia n/ Pengesa han/ Pembatal an (RP)	Pengujian/ Pengesahan (RP)	No	Jenis UTTP dan BDKT	Satua n	Tera Pengujia n/ Pengesa han/ Pembatal an (RP)	Pengujian/ Pengesahan (RP)	2.	izin tipe dalam point 35. Pembenan izin tipe dan izin tipe tanda pabrik dan merekomendasikan pelaksanaan
		1 2	3	4	5	-	B. Biaya Tera dan Tera	3	4	5		permohonan izin
		A. Biaya Tera dan Tera Ulang 1. UKURAN PANJANG: a. Sampai dengan 2 m: 1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dan bahan logam 3) Meter saku baja 4) Salib ukur 5) Gauge block 6) Micrometer 7) Jangka sorong b. Lebih dan 2 m sampai dengan 10 m: 1) Tongkat duga 2) Meter saku baja 3) Bahan ukur kundang, Depth tape 4) Alat ukur tinggi orang 5) Komparator Dan seterusnya B. Biaya-penelitian dalam rangka-ijin-type dan ijin-type tanda-pabrik atau-pengukuran atau penimbangan lainnya yang janis terlentu	buah buah buah buah buah buah buah buah	3,000,- 5,000,- 2,000,- 5,000,- 10,000,- 2,000,- 15,000,- 30,000,- 45,000,- 20,000,-	2,500,- 4,000,- 2,500,- 7,000,- 8,500,- 10,000,- 10,000,- 8,500,- 8,500,- 35,000,- 8,500,- 50,000,-	1.	Ulang UKURAN PANJANG: c. Sampai dengan 2 m: 8) Meter dengan pegangan 9) Meter meja dan bahan logam 10) Meter saku baja 11) Salib ukur 12) Gauge block 13) Micrometer 14) Jangka sorong d. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m: 6) Tongkat duga 7) Meter saku baja 8) Bahan ukur kundang, Depth tape 9) Alat ukur tinggi orang 10) Komparator	buah buah buah buah buah buah buah buah	3,000,- 5,000,- 2,000,- 10,000,- 10,000,- 10,000,- 15,000,- 30,000,- 45,000,- 20,000,-	2,500,- 4,000,- 2,500,- 7,000,- 8,500,- 10,000,- 10,000,- 8,500,- 8,500,- 35,000,- 8,500,- 50,000,-		merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga biaya penelitian dalam rangka izin tersebut tidak diperlukan, sesuai PP 38 Tahun 2007.

1	2	3	4	5
7	Penentuan	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12 disempumakan
	Pembayaran, Tempat	(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.	(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.	
	Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayran	(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	
		(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati	(3) Tata cara pembayaran, penentuan <u>tempat</u> pembayaran angsuran dan <u>penundaan</u> pembayaran retribusi <u>diatur</u> dengan Peraturan Bupati	
8	Penagihan	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14 disempurnakan
		(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.	(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat penngatan atau surat lain yang sejenis.	
((2) Pengeluaran surat teguran atau surat peningatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	(2) Pengeluaran surat tequran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	
		(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	
		(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	(4) Surat <u>teguran/peringatan/surat lain</u> yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	
		(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	(5) Tata cara <u>Penagihan dan</u> penerbitan surat <u>teguran/peringatan/surat lain</u> yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	

1	2		4	5
9	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjad kedaluwarsa setelah melampaui waktu.3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecual jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana d bidang Retribusi.	kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahur	i sama dengan Pasal 19 i ayat (3) Raperda
		(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.	(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.	
		(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.	(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.	
<i>,</i>		(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	
		(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
		(6) Tata: cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Rebetatan oleh Wajib Nethbusi.	
10	Penyidikan	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21 ayat (1)
		 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dst. 	Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana <u>dibidang</u> retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
((2)dst	

1	2	3	4	5
11	Penetapan dan Pengundangan	Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,	Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,	Nama jabatan yang mengundangkan disempurnakan
		HENDARMA -	HENDARMA NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 2/PSW/2014	Pada akhir lembar penetapan dan pengundangan tambahkan frase nomor register

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO